BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman modern masyarakat telah banyak mengalami perkembangan dalam kehidupannya, kini masyarakat mulai memasuki era informasi, dimana semua negara berusaha agar seluruh pedesaan, lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, lembaga pemerintah dan lain-lain terhubung dalam satu jaringan, sehingga interaksi dalam berbagai aspek di seluruh dunia dapat dilakukan secara mudah dan cepat melalui telematika. Perkembangan globalisasi informasi yang didukung oleh kemajuan teknologi kini telah mengubah aspek-aspek tradisional masyarakat, sehingga adanya hal tersebut tentu mempermudah masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Hal ini terbukti dengan adanya terobosan baru teknologi informasi yang telah lama melahirkan teknologi informasi komputer yang canggih yaitu Internasional Networking (Internet).¹ Tidak hanya pada dunia digital namun juga memasuki perkembangan industri di lingkup masyarakat modern dimana Perkembangan industri modern merupakan gejala yang erat hubungannya dengan perkembangan masyarakat, sekaligus merupakan sebab dan akibat berbagai

¹ Muhammad Zamroni, **Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya Terhadap Kehidupan**, Jurnal Dakwah, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009, ISSN 2055-2451, hlm. 10

perkembangan lain, seperti penambahan penduduk, urbanisasi, pembukaan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian.²

Industri pengolahan membantu manusia untuk lebih mudah memenuhi kebutuhannya, petani memerlukan cangkul, pembajak sawah memerlukan alat bajak, pemilik anggrek membutuhkan pot-pot anggrek, pemilik hotel membutuhkan keranjang buah dan seterusnya. Bila sepotong bambu dijadikan keranjang buah untuk disediakan di hotel-hotel dan restoran, maka bamboo tersebut telah mempunyai nilai tambah. Istilah industri juga digunakan bagi suatu bagian produksi ekonomi yang terfokus pada proses manufakturisasi tertentu yang harus memiliki permodalan yang besar sebelum bisa meraih keuntungan. Dalam kasus ini sebenarnya lebih tepat disebut industri besar. Sebagai contoh pada tahun 2004, bisnis jasa keuangan adalah industri terbesar di dunia dalam kategori pendapatan. Dalam perencanaan ekonomi dan wilayah urban, kawasan industri pabrik adalah penggunaan lahan 2 dan aktivitas ekonomi secara intensif yang berhubungan dengan manufakturisasi dan produksi baik tingkah laku dalam kegiatan ekonomi maupun subsistem lainnya.³ Perilaku kerja dan hubungan manusia merupakan dua konsep utama dalam membahas nilai dan perilaku hubungan masyarakat industri. Perubahan perilaku masyarakat dari masyarakat transisi (dari masyarakat agraris) ke masyarakat industri modern mengubah pola-pola hubungan kerja secara

² Venti Eka Satya, 2018, "**Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0**", Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol X, No. 09, Mei 2018, ISSN 2088-2351, hlm. 105

³ Euis Soliha, **Analisis Industri Ritel di Indonesia**, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 5, No. 2, September 2008, ISSN: 1412-3126, hlm. 15

keseluruhan. Perubahan ini bersifat mendasar, yang berhubungan dengan landasan filosofi dan pandangan hidup masyarakat secara kolektif.

Pembangunan nasional, khususnya bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pekerja. Oleh karena itu hukum ketenagakerjaan harus dapat menjamin kepastian hukum, nilai keadilan, asas kemanfaatan, ketertiban, perlindungan dan penegakan hukum. Seiring dengan pembangunan bidang ketenagakerjaan, tampak maraknya para pelaku dunia usaha berbenah diri pasca krisis ekonomi dan moneter untuk bangun dari mimpi yang buruk, serta terpaan gelombang krisis ekonomi global yang melanda asia tenggara, di mana Indonesia tidak lepas dari terpaan gelombang tersebut. Pemerintah dalam upaya mengatasi krisis ekonomi global bersama dengan masyarakat, terutama para pelaku usaha, salah satu alasan pokok untuk menstabilkan perekonomian dan menjaga keseimbangan moneter serta menghindari kebangkrutan sebagian besar perusahaan yang berdampak terhadap sebagian besar nasib para pekerja pabrikan dan berujung pada pemutusan hubungan kerja.

Tenaga kerja (Sumber Daya Manusia) merupakan satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap semua perkembangan perekonomian di dunia. Tenaga kerja tidak terlepas dari pembangunan, Tenaga kerja tidak terlepas dari kehidupan, dan tenaga kerja merupakan tonggak utama perekonomian suatu bangsa, di samping Sumber Daya Alam dan teknologi. Bahkan Di negara-negara berkembang pada umumnya memiliki tingkat pengangguran yang jauh lebih tinggi, dari angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena ukuran sektor informal

masih cukup besar sebagai salah satu lapangan nafkah bagi tenaga kerja tidak terdidik. Sektor informal tersebut dianggap sebagai katup pengaman bagi pengangguran.⁴

Di Indonesia, masalah ketenagakerjaan mulai menjadi perhatian sejak masuknya penjajahan. Dimulai dengan belanda, portugis, inggris, dan kemudian jepang. Semuanya menerapkan sistemnya masing-masing. Meskipun demikian, perlindungan terhadap tenaga kerja baru mulai mendapat perhatian setelah Belanda di bawah pimpinan Deandels menerapkan etische politik (politik balas budi). Semenjak saat itu, maka mulai lahir peraturan-peraturan (hukum) tentang ketenagakerjaan, yang mana peraturan yang dibuat mulai memeperhatikan sisi-sisi kemanusiaan. Seiring perjalanan bangsa sampai memasuki era kemerdekaan, peraturan demi peraturan dibuat untuk melindungi, dan menjamin kesejahteraan, keselamatan, dan keberlangsungan hidup (secara kemanusiaan) para pekerja. Kini, kita sudah lebih dari setengah abad merdeka. Namun, masalah yang menyangkut tentang ketenagakerjaan mulai dari Upah, Kesejahteraan, dan lain sebagainya masih menjadi sorotan. Semuanya masih jauh dari harapan. Kita bisa melihat bahwa hampir semua aksi Buruh memperingati hari buruh sedunia (mayday) selalu menuntut keadilan atas dasar kemanusiaan. Para buruh selalu meneriakan tentang sistem kerja kontrak, upah, dan lain sebagainya yang semuanya berujung pada kesejahteraan para pekerja.

⁴Laurensius Arliman, S, **Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia**, Jurnal Selat, Vol. 5, No. 1, Oktober 2017, ISSN : 4453-2567, hlm. 75

Masalah kian muncul dengan adanya Pandemi virus Covid-19 yang kini kian menebar ancaman dan mengganggu stabilitas negara-negara yang ada di dunia. Salah satunya Indonesia termasuk yang terkena dampak besar karena banyaknya warga negara Indonesia yang menjadi korban.⁵ Penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan Covid-19 dalam bentuk tindakan. Corona virus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti ; SARS, MERS, dan Covid-19 sifatnya lebih mematikan. Wabah atau virus corona telah menyebabkan kerugian nyata dikalangan masyarakat dunia. Kerugian ini juga dialami oleh Indonesia, bahkan ada yang sakit dan meninggal akibat virus corona tersebut.

Tindakan dan antisipasi yang diambil pemerintah yaitu dalam bentuk adanya pembatasan sosial (social distancing). Pilihan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial ini menarik dicermati karena pilihan tersebut merupakan pilihan

⁵ Yida Sekti Purnomo, **Pesmin Alvanis, Tinjauan Hukum Terhadap Virus Korona, Pemecatan Pegawai dan Korupsi**, Jurnal Hukum, Vol.2 No.2, Maret 2020 ISSN : 2355-3454, hlm. 1

yang berisiko terhadap upaya pencegahan terjangkitnya orang akibat virus corona ini. Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pembatasan sosial berskala besar seperti pembatasan kegiatan tertentu yang dimaksud adalah membatasi berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak pada suatu lokasi tertentu. Kegiatan yang dimaksud seperti sekolah, kerja kantoran dan kerja pabrik, keagamaan, pertemuan, pesta perkawinan, rekreasi, hiburan, festival, pertandingan olahraga dan kegiatan berkumpul lainnya yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi.⁶

Salah satu sektor yang sangat terdampak dari pandemi corona ini adalah ketenagakerjaan. Meluasnya penyebaran virus corona hampir di seluruh wilayah Indonesia sangat mempengaruhi kinerja, produktivitas, keuangan perusahaan maupun kewajiban pengusaha untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional salah satunya membayar hak-hak normatif pekerja seperti upah. Disamping itu, adanya

⁶ Yuliana, **Corona Virus disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur, Wellness and healthy magazine**, Jurnal Kesehatan, Vol. 2, Nomor 1, 2020, ISSN 2656-0022, hlm. 102

pembatasan aktivitas dan himbauan untuk bekerja dari rumah (work from home) menimbulkan suatu masalah baru bagi perusahaan mengingat tidak semua jenis pekerjaan bisa dikerjakan di rumah oleh pekerja.

Pandemi Covid-19 hampir menyebar keseluruh wilayah Indonesia termasuk Bali dimana Bali sangat bertumpu pada sektor pariwisata. Hampir sepertiga dari seluruh hasil penjualan barang dan jasa di Bali berasal dari sektor penginapan, makanan dan minuman, atau setara dengan Rp 58,7 triliun. Dengan adanya Covid-19 hal ini tentunya sangat mengurangi mobilitas penduduk yang sangat berdampak pada kinerja ekonomi suatu wilayah. Salah satu industri yang terdampak adalah industri pariwisata. Sebagai industri yang berbasis pada mobilitas orang, wabah virus korona langsung memukul industri pariwisata. Banyaknya sektor ekonomi dalam industri pariwisata menyebabkan dampak penurunan industry pariwisata tidak hanya terbatas pada sektor yang berhubungan dengan perjalanan wisatawan maupun akomodasi. Hantaman pandemi virus korona saat ini di pulau dewata lebih keras dibandingkan bom bali dan meletusnya Gunung Agung.⁷

Perusahaan dan pekerja atau buruh memiliki keterkaitan yang sangat dekat. Keterkaitan antara keduanya tentu karena suatu perusahaan memerlukan buruh untuk dapat menjalankan kegiatannya. Bisa dibilang dalam hal ini buruh merupakan salah satu indikator penting dalam kesuksesan dunia usaha khususnya perusahaan. Perusahaan takkan berjalan tanpa adanya buruh sebagai penggerak di perusahaan

⁷ Ida Ayu Devi Arini, Ida Bagus Gede Paramita, Komang Alit Triana, **Ekspektasi, Realisasi Dan Negosiasi Tourism Reborn Di Masa Pandemi Dalam Pariwisata Bali**, Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu, Vol 1, No. 2, Oktober 2020, ISSN : 2745-7915, hlm. 102

tersebut, di sisi lain buruh yang bekerja di suatu perusahaan juga tentu menggantungkan hidupnya melalui upah yang diterima dari perusahaan.⁸

Harapan besar terbentuknya suatu hubungan kerja yang baik dan harmonis nyatanya tidak selalu berjalan baik. Perkembangan dalam lingkup hubungan kerja pun bermacam-macam, yang pada akhirnya bisa berujung pada kondisi pekerja atau buruh mengalami kondisi "dirumahkan" bahkan dilakukan pemutusan hubungan kerja yang pada dasarnya justru sangat dihindari baik dari sisi pengusaha maupun sisi pekerja atau buruh. Meskipun pada praktiknya, pihak pengusaha jarang mengambil sikap untuk merumahkan pekerjanya dan cenderung memilih untuk langsung melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruhnya.

Istilah "dirumahkan" hingga sekarang masih menjadi perdebatan antara pihak pekerja atau buruh maupun pihak pengusaha yang tidak jarang menimbulkan multitafsir dan kemudian berdampak pada hak-hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Satu pihak menilai bahwa istilah "dirumahkan" ini sama halnya dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak pengusaha kepada pihak pekerja atau buruh. Sedangkan pihak lain menilai bahwa istilah "dirumahkan" ini sangat berbeda dengan pemutusan hubungan kerja. Kondisi seperti inilah yang sebenarnya harus diluruskan agar jangan sampai pemaknaan "dirumahkan" kemudian menjadi hal yang terus diperdebatkan tanpa ujung.⁹

⁸ Winariani, **Majalah Resmi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia**, Jurnal Kesehatan, Vol 40, No. 2, April 2020,ISSN : 3245-6789, hlm. 120.

⁹ Ibid, hlm 20

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur mengenai pekerja yang dirumahkan. Meskipun demikian bukan berarti lantas tidak ada payung hukum yang mewadahi istilah "dirumahkan" ini. Hingga saat ini, hal-hal yang berkaitan dengan istilah "dirumahkan" dapat merujuk pada Butir f Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Kepada Pimpinan Perusahaan di Seluruh Indonesia Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal (SE Menaker 907/ 2004) serta dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja (SE Menaker 5/ 1998) yang menjadi dasar hukum dalam pekerja yang dirumahkan namun tidak secara spesifik.

Perlindungan hukum tenaga kerja sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dalam menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh, menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh beserta keluarganya tidak lepas dengan memperhatikan perkembangan kemajuan dalam 3 persaingan usaha. Karena itu para tenaga kerja wajib mendapatkan perlindungan serta pemenuhan terhadap hak-haknya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pada hakikatnya para pekerja wajib mendapatkan perlindungan serta pemenuhan dalam hak-haknya tanpa terkecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi dalam pelaksanaannya tidak jarang para

pekerja tidak mendapatkan hak-haknya. Terdapat hak normatif pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.¹⁰

Berdasarkan beberapa hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis hendak membuat suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan Judul :

"KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEKERJA YANG DIRUMAHKAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN."

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Pekerja yang dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?
2. Apakah Pengaturan Hak dan Kewajiban Pemutusan Hubungan Kerja dapat diberlakukan terhadap Pekerja yang dirumahkan akibat Covid-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penelitian ini bisa memperoleh sasaran yang dikehendaki dan sesuai dengan harapan yang diinginkan, maka ditetapkan tujuan penulisan sebagai berikut :

¹⁰ Heru Suyanto, Andriyanto Adhi Nugroho, **Perlindungan Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan**, Jurnal Yuridis, Vol. 3 No. 2, 2017, ISSN 2343-2212, hlm. 78

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam menyampaikan gagasan pikiran ilmiahnya secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan dan mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan mahasiswa mengenai permasalahan hukum.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum yang didapat dalam bangku kuliah.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Pengaturan Tentang Pekerja yang dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui Pengaturan Hak dan Kewajiban Pemutusan Hubungan Kerja dapat diberlakukan terhadap Pekerja yang dirumahkan akibat Covid-19.

1.4 Metode Penelitian

Metodelogi berasal dari kata metode (jalan), namun demikian peristilahan metodelogi ini dalam praktik kebiasaan dipergunakan dalam suatu penelitian dan

penilaian yang dirumuskan dengan berbagai kemungkinan.¹¹ Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normative terhadap asas-asas hukum yang berlaku. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum sekunder yang mana bahan hukum sekunder dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun berkaitan dengan metode penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹² Berdasarkan penjelasan di atas, Penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan Penulis.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2012, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Press, Jakarta, hlm. 5

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

1.4.2 Jenis Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach).¹³ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, terdapat 3 bahan pustaka yang digunakan oleh penulis, yaitu :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm. 29

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019 (Covid-19).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/ 328/ 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease di Tempat Kerja Perkantoran Serta Industri Dalam Menunjang Keberlangsungan Usaha Pada Suasana Pandemi.
8. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Kepada Pimpinan Perusahaan di Seluruh Indonesia Nomor SE-907/MEN/PHIPPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal.
9. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja.
10. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19.
11. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/9/HK.04/VII/2021 tentang Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan ditempat Kerja dan Penyediaan Perlengkapan Serta Sarana

Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh Oleh Perusahaan selama Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari kutipan-kutipan teori atau ajaran, buku-buku hukum, makalah, jurnal hukum, artikel, internet dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Norma Kabur.

1.4.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di

analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.¹⁴

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Terdiri dari pendahuluan yang di dalamnya menguraikan Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Terdiri dari Kajian teoritis yang di dalamnya menguraikan landasan teori terdiri Teori Pelindungan Hukum, Teori Keadilan, dan Kerangka Konseptual terdiri atas pekerja didalamnya terisi pengertian pekerja, hak dan kewajiban pekerja, pekerja yang dirumahkan didalamnya terisi peristilahan pekerja yang dirumahkan, akibat hukum dari pekerja yang dirumahkan dan pandemi Covid-19 didalamnya terisi sejarah kemunculan pandemi Covid-19 dan dampak pandemi Covid-19

BAB III Terdiri dari Pengaturan tentang Perkerja yang tidak dipekerjakan dan Pemutusan Hubungan Kerja dalam sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Pekerja yang dirumahkan Akibat Pandemi Covid 19 menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, 1997, **Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara**, Ind.Hill.Co, Jakarta, hlm. 17-18

BAB IV Terdiri dari Hak dan Kewajiban Pekerja yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pengaturan Akibat Hukum dari Pekerja yang dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB V Terdiri dari simpulan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, soal Pemberhentian Hubungan Kerja jelas diatur secara definisi maupun hak dan konsekuensinya bagi pekerja. Sedangkan 'dirumahkan' diatur melalui surat menteri yakni Surat Edaran Nomor : SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang pencegahan pemutusan hubungan kerja massal dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja melalui surat edaran menteri tersebut pekerja yang dirumahkan mendapatkan dasar hukum namun dalam hal ini kurang begitu spesifik dan saran Pekerja yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19 masih belum jelas peraturannya dan belum memiliki peraturan yang spesifik yang menjelaskan tentang peraturan-peraturan pekerja yang dirumahkan, sehingga dalam hal ini perlu adanya aturan yang berlaku secara khusus demi menjalankan tertib hukum di Indonesia ini.